

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis data mengenai Sinergitas antara Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin Pasar Cempaka dan Pemerintah Daerah Dalam Mendorong program UMKM di Kota Banjarmasin.

1. Sinergitas antara Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin Pasar Cempaka dan Pemerintah Daerah seperti Dinas UMKM dapat dikatakan sudah baik. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih baik, harus lebih memperhatikan dan memaksimalkan apa yang dilakukan. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin Pasar Cempaka bekerja sama dengan kebijakan pemerintah daerah seperti dinas umkm seperti mengadakan sosialisasi kepada para pelaku UMKM di Kota Banjarmasin meliputi penyelenggaraan seminar, workshop, atau pelatihan.
2. Permodalan yang diberikan Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin Pasar Cempaka kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah Kredit Usaha Rakyat(KUR). KUR adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberi usaha mikro kecil dan menengah akses ke pembiayaan kepada usaha kecil dan mikro dengan suku bunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah. Kelebihan mengajukan KUR di Bank Syariah Indonesia terletak pada kesesuaian dengan prinsip syariah yang tidak melibatkan riba, persyaratan yang simpel, dan biaya administrasi yang rendah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin Pasar Cempaka sebaiknya mencari strategi kedepan untuk lebih memaksimalkan dalam hal mendorong UMKM Kota Banjarmasin.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Kepada pemerintah daerah diharapkan lebih berperan penting dalam proses perkembangan dan mendorong UMKM di Kota Banjarmasin.

3. Bagi Masyarakat

Kepada masyarakat kota Banjarmasin yang sebagian terlibat sebagai nasabah UMKM sebaiknya menggunakan dana KUR nya sebaik mungkin untuk perkembangan usaha.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis peran sinergitas lembaga keuangan syariah dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong umkm dengan standar yang telah ditetapkan.